

# TESIS

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN  
DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PULAU TALIABU**

*The Influence of Budget Planning and Human  
Resource Quality on Financial Performance  
through the Local Financial Information System  
in Pulau Taliabu District*

**MARLINA LA ANDI  
A042221007**



**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

# **TESIS**

## **PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU**

sebagai persyaratan memperoleh gelar MAGISTER Keuangan Daerah

disusun dan diajukan oleh

**MARLINA LA ANDI  
A042221007**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

### PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU

Disusun dan diajukan oleh

**MARLINA LA ANDI**  
A042221007

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
tanggal 18 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si  
NIP 19650307 199403 1 003



Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si  
NIP 197106192000031001

Ketua Program Studi Magister  
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si  
NIP 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM  
NIP 196402051988101001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Marlina La Andi**

NIM : **A042221007**

Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Januari 2024

yang menyatakan,



**Marlina La Andi**

## PRAKATA



Rasulullah Saw. Bersabda: “seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin, dan sebaik-baiknya para pemimpin adalah mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah ia yang berada di depan pintu rumah orang fakir, dan seburuk-buruk orang fakir adalah ia yang berada di depan pintu rumah pemimpin.” (Rumi, 2015)

*Alhamdulillah* rabbi alamin, segala puji peneliti panjatkan kepada maha suci Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.”**

Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Sayidina Muhammad Saw. yang telah menyelamatkan peradaban dari lembah kegelapan, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya, dengan untaian shalawat untuk melaksanakan kewajiban mengagungkan kedudukannya dan memuliakan pangkatnya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang harus dilalui sebagai bagian dari proses pembelajaran yang *insyaAllah* mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan peneliti dan mendekatkan peneliti pada Sang Pemilik Ilmu. Peneliti memohon pertolongan kepada-Nya yang menjadi asal dari segala sesuatu. *Alhamdulillah*, Allah mengirimkan pertolongan dengan mempertemukan

peneliti dengan orang-orang yang senantiasanya memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Hi. La Andi Musbah dan Wa Abe Lapola, yang di setiap sujudnya selalu mendoakan kebaikan dan kemudahan dalam setiap proses kehidupan peneliti. Semoga Allah melimpahkan sebaik-baiknya cinta kepada mereka.
2. Para pemimpin Kabupaten Pulau Taliabu. Bapak Aliong Mus, ST., selaku BUPATI dan Bapak Dr. Salim Ganiru selaku SEKDA Pulau Taliabu yang memberikan izin dan dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan studi Program Magister Keuangan Daerah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Muhamad Ridwan Azis, SE.ME., selaku Kepala Badan Keuangan, serta Bapak Irwan Mansur, SH. dan Bapak Abdul Kadir Nur Ali, S.Sos., ME., yang telah memberikan bantuan moril dan materil selama peneliti menjalankan studi dan penyelesaian tesis sebagai tugas akhir.
4. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Para pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku dekan. Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si., CRA., CRP., CWM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP., CWM selaku Wakil Dekan Bidang

Keuangan. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi. Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah.

6. Dosen komisi penasehat, Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si. dan Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si. yang telah membimbing peneliti dengan penuh dedikasi dan kesabaran selama proses penulisan tesis.
7. Dosen tim penguji, Dr. Nurdjanah Hamid, SE., M.Agr., Dr. Aini Indrajawati, SE., Ak., M.Si., CA., dan Dr. Sabir, SE., M.Si. yang dengan bijaksana telah memberikan saran dan arahan agar tesis ini selesai dengan baik.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan didikannya.
9. Bapak dan Ibu Pegawai di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pak Haris dan para pegawai lainnya yang tidak peneliti sebutkan, yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi.
10. Teman-teman seperjuangan, Bapak Sano B. Parigi, SE., Bapak Alfath Lajaruddin, SE., Bapak Dahlan Etlegar, S.Hut., Ibu Nunung Susilawati Hasan, S.Hut., Ibu Sandra Jeanet Muntu, SE., dan Ibu Wa Ode Helda, SE. Semoga perjuangan yang kita lalui bersama bisa mempererat tali persaudaraan kita.

11. Ibu Yumna, SE., selaku teman dekat dan rekan kerja, yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama menjalani cobaan-cobaan dalam Menyusun tesis.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan terutama kepada peneliti sendiri. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penelitian ini.

Makassar, 20 Januari 2024

Marlina La Andi



## ABSTRAK

MARLINA LA ANDI. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau TALIABU* (dibimbing oleh Syarifuddin Rasyid dan Wanda).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah melalui sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu. Data penelitian menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pegawai pemerintah di lingkungan Kabupaten Pulau Taliabu. Analisis data menggunakan teknik kuantitatif deskriptif memakai alat analisis Smart PLS versi 4. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas SDM memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran yang baik dan SDM yang kompeten untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan mengidentifikasi risiko, melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, dan mengambil tindakan yang tepat. SIPKD berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan anggaran, kualitas SDM, dan kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih efisien jika ada SIPKD yang baik, perencanaan anggaran yang matang, dan SDM yang kompeten. Hal ini akan meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Taliabu. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang komponen yang memengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Rekomendasi yang diajukan meliputi perbaikan perencanaan anggaran, peningkatan kualitas SDM, penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan yang baik, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, serta pengembangan mekanisme pembelajaran internal untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, kinerja keuangan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Pulau Taliabu



## ABSTRACT

MARLINA LA ANDI. *The influence of Budget Planning and Human Resource Quality on Financial Performance through the Regional Financial Information System in Taliabu Island Regency* (supervised by Syarifuddin Rasyid and Wahda)

The research aims at describing the impact of the budget planning and the quality of human resources on the regional financial performance through the regional financial management information system (SIPKD) in Taliabu Island Regency. Data were analysed using the quantitative descriptive method with Smart PLS version 4 analytical tool. This research result indicates that the budget planning and quality of human resources have the positive and significant impact on the financial performance of Taliabu Island Regency. This shows the importance of the good budget planning and the competent human resources to improve the regional financial performance by identifying the risks, conducting better financial planning, and taking the appropriate action. SIPKD serves as the link between the budget planning, human resource quality, and financial performance. The regional financial management can be performed more efficiently if there is the good SIPKD, mature budget planning, and the competent human resources. This will improve the financial performance of the Taliabu Island Regency. This research improves understanding of the components that affect the financial performance of the Taliabu Island Regency. The recommendations include improving the budget planning, improving the human resource quality using the sound financial management information system, enhancing supervision and accountability, as well as developing the internal learning mechanism to share the experiences and best practices in regional financial management.

Key words: budget planning, human resource quality, financial performance, local financial management information system, Taliabu Island Regency



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	.iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kegunaan Penelitian .....	13
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	13
1.4.2. Kegunaan Praktis .....	13
1.5. Batasan Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep .....	16
2.1.1. <i>New Public Management</i> (NPM) .....	16
2.1.2. <i>Goal Setting Theory</i> .....	17
2.1.3. Kinerja Keuangan Daerah .....	18
2.1.4. Perencanaan Anggaran.....	22
2.1.5. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	32
2.1.5. Kualitas Sumber Daya Manusia .....	35
2.1.6. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) .....	41
2.2. Penelitian Terdahulu.....	42
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	46

3.1.	Kerangka Konseptual .....	46
3.2.	Hipotesis .....	48
3.2.1.	Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	48
3.2.2.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	51
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>		<b>54</b>
4.1.	Rancangan Penelitian .....	54
4.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54
4.3.	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	55
4.4.	Jenis dan Sumber Data .....	56
4.5.	Metode Pengumpulan Data.....	57
4.6.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	57
4.6.1.	Variabel Independen (Eksogen) .....	58
4.6.2.	Variabel Mediasi atau Intervening .....	58
4.6.3.	Variabel Dependen (Endogen) .....	58
4.6.4.	Definisi Operasional.....	59
4.6.4.1.	Perencanaan Anggaran ( $X_1$ ) .....	59
4.6.4.2.	Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_2$ ).....	60
4.6.4.3.	Sistem Informasi Keuangan Daerah ( $Y_1$ ).....	61
4.6.4.4.	Kinerja Keuangan Daerah ( $Y_2$ ).....	62
4.7.	Instrumen Penelitian.....	63
4.8.	Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis .....	63
4.8.1.	Analisis deskriptif .....	64
4.8.2.	Analisis <i>Structural Equation Model</i> (SEM) .....	64
4.8.3.	Analisis Persamaan SEM dengan <i>Partial Least Square</i> (PLS).....	65
4.8.4.	Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	66
4.8.5.	Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	69
4.8.6.	Uji Hipotesis .....	71
4.8.7.	Analisis SEM dengan Efek Mediasi.....	72
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>73</b>

5.1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	73
5.1.1.	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	75
5.1.2.	Analisis Deskriptif Variabel Eksogen.....	75
5.1.3.	Analisis Deskriptif Variabel Mediasi .....	78
5.1.4.	Analisis Deskriptif Variabel Endogen.....	79
5.2.	Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	80
5.2.1.	Uji <i>Convergent Validity</i> .....	80
5.2.2.	Uji <i>Discriminant Validity</i> .....	82
5.2.3.	Uji <i>Composite Reliability</i> .....	83
5.3.	Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	85
5.3.1.	<i>R-Square</i> ( $R^2$ ) .....	85
5.4.	Uji Hipotesis.....	86
5.4.1.	Uji Efek Mediasi .....	88
5.5.	Pembahasan.....	93
5.5.1.	Perencanaan Anggaran berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah .....	93
5.5.2.	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah .....	98
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>103</b>
6.1.	Kesimpulan .....	103
6.2.	Keterbatasan .....	106
6.3.	Saran dan Rekomendasi.....	107
6.4.	Implikasi Penelitian.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>116</b>
Lampiran 1.	Kuesioner Penelitian.....	116
Lampiran 2.	Hasil Uji Validitas ( <i>Convergent Validity</i> ).....	116
Lampiran 3.	Hasil <i>Cross Loading Factor</i> .....	116
Lampiran 4.	Hasil Uji <i>Path Coefficient</i> .....	116
Lampiran 5.	Hasil Uji <i>Total Indirect Effects</i> .....	116
Lampiran 6.	Hasil Uji <i>Specific Indirect Effect</i> .....	116

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2019-2022 ....	5
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian .....	56
Tabel 5. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	73
Tabel 5. 2 Karakteristik Responden.....	74
Tabel 5. 3 Statistik Deskriptif Variabel Perencanaan Anggaran .....	76
Tabel 5. 4 Statistik Deskriptif Variabel Kualitas SDM.....	77
Tabel 5. 5 Statistik Deskriptif Variabel SIKD.....	78
Tabel 5. 6 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan Daerah .....	79
Tabel 5. 7 Hasil Uji Validitas ( <i>Convergent Validity</i> ) .....	80
Tabel 5. 8 Nilai <i>Discriminant Validity</i> .....	82
Tabel 5. 9 Hasil Uji Validitas ( <i>Composite Validity</i> ).....	84
Tabel 5. 10 Hasil Uji <i>Inner Model</i> .....	85
Tabel 5. 11 Hasil Uji Hipotesis.....	87
Tabel 5. 12 Hasil Uji <i>Total Effect</i> .....	88
Tabel 5. 13 Hasil Uji <i>Path Coefficient</i> .....	89
Tabel 5. 14 Hasil Uji Indirect Effects.....	91
Tabel 5. 15 Hasil Uji <i>Specific Indirect Effects</i> .....	93

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian .....	47
Gambar 5. 1 Hasil Uji Outer Model.....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak diberlakukan pada 1 Januari 2001, otonomi daerah memberikan peluang pada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bisa bersaing dalam upaya kemandirian daerah. Artinya, kebijakan dasar yang diperlukan untuk pembangunan daerah dimiliki secara penuh oleh pemerintah daerah karena sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan telah beralih dari pusat ke daerah. Desentralisasi fiskal dan desentralisasi pembangunan adalah reformasi utama dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah pada era otonomi daerah. Wewenang Pemda dalam mengelola keuangan daerah meliputi *revenue assignment* dan *expenditure assignment* (Hantandi 2022) membuat Pemda dapat secara mandiri mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan harus diatur, direncanakan, disusun, ditetapkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Wujud dari proses perencanaan dan penganggaran pada pemerintahan daerah adalah proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD) sebagai anggaran publik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program program yang dibiayai yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2002).

Pada praktiknya, usaha Pemda untuk mewujudkan *good fiscal governance* masih menemui sejumlah permasalahan (Purbadharmaja *et al.*, 2019; Gonschorek & Schulze, 2018). Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemda yaitu terlambat dalam menetapkan APBD. Definisi dari terlambat dalam menetapkan APBD yaitu kondisi Ketika kepala daerah tidak mampu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD sebelum tahun anggaran dimulai. Berdasarkan data penetapan APBD dari 548 provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, baru 423 daerah yang APBD-nya ditetapkan tepat waktu dan telah memiliki Perda APBD 2022 (Sulistyo, 2022). APBD yang terlambat ditetapkan akan memengaruhi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD. Akibat selanjutnya adalah program yang telah direncanakan akan dilaksanakan secara tergesa-gesa dan terkesan seadanya, karena waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat. Hal ini tentu akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut.

Perencanaan anggaran sektor publik di era reformasi ditandai dengan lahirnya *New Public Management* (NPM). NPM merupakan usaha untuk mendorong pengembangan perencanaan dengan pendekatan yang sistematis (Mardiasmo, 2002:21). Salah satu aspek utama reformasi anggaran adalah kualitas dan kuantitas terukur yang mengutamakan

keluaran/hasil dari satu program/kegiatan. Anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian *output* dari *input* yang ditetapkan. Penerapan sistem anggaran kinerja dimulai dengan perumusan program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Penilaian keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan/program/kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja (Suhadak & Nugroho, 2007:22).

Tujuan dan sasaran organisasi dapat terwujud melalui perencanaan anggaran yang baik. Perencanaan anggaran yang baik mengatur hak-hak pemerintah dalam menyerap pendapatan yang sah dan mengalokasikan belanja sesuai dengan klasifikasi pendapatan dan belanja yang tepat. Rencana anggaran atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) berupa dokumen yang berisi program kerja maupun kegiatan selama satu periode/anggaran kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program/kegiatan daerah. Penyusunan RKA dilakukan dengan klasifikasi anggaran yang tepat agar pengendalian anggaran, pengukuran, dan pelaporan kinerja anggaran tercipta dengan baik. Pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Perencanaan anggaran yang baik tentunya berdampak baik terhadap perencanaan anggaran berikutnya, tetap jika perencanaan awal yang buruk, maka perencanaan anggaran berikutnya dapat berakibat buruk pula.

Hasil akhir dari penyusunan RKA adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan suatu entitas dalam hal ini pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan anggaran adalah dengan menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). LKPD memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Setiap tahun, LKPD akan diperiksa dan dievaluasi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi manajemen pemerintah tentang kondisi keuangan pemerintah dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Patarai (2018: 258), kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja keuangan daerah juga berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta pengawasan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dengan baik, menjaga keseimbangan anggaran, dan menerapkan prinsip

tata kelola yang baik akan berdampak langsung pada kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2005: 274). Kinerja keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rinova & Dewi, 2021) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing. Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang melakukan pemeriksaan di seluruh instansi di Indonesia setiap tahun, menunjukkan kinerja keuangan pemerintah. Berikut adalah ukuran akuntabilitas pelaporan keuangan dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

**Tabel 1. 1**

**Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2019-2022**

<b>LKPD TAHUN</b>	<b>OPINI BPK</b>	<b>Target Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>%</b>
2019	TMP	598.660.303.261	537.039.012.938	89,71
2020	TMP	535.947.827.168	414.426.565.034	77,33
2021	WDP	793.726.372.104	613.925.906.064	77,35
2022	WDP	938.738.853.761	712.969.866.779	75,95

*Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diolah, 2023.*

Dilihat dari sisi target anggaran yang direncanakan untuk dibelanjakan dan realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 89,71% dan pada tahun 2020 sebesar 77,33%. Pada tahun 2021 dan 2022 target anggaran yang

direncanakan untuk dibelanjakan dan terealisasi, masing-masing sebesar 77,35% dan 75,95%. Jika dilihat dari segi penyerapan, capaian penyerapan anggaran dan belanja Kabupaten Pulau Taliabu termasuk dalam kategori cukup baik. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan opini yang dikeluarkan BPK atas LKPD Kabupaten Pulau Taliabu yang belum optimal.

LKPD Pulau Taliabu pada tahun 2019 dan 2020 menurut pendapat BPK adalah TMP (Tidak Memberikan Pendapat). Pada tahun 2021 dan 2022, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut pernyataan TMP BPK, auditor BPK tidak akan memberikan pendapat atas laporan jika lingkup audit yang dilakukan tidak cukup untuk membuat suatu opini. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kekurangan bukti atau informasi yang diperlukan untuk menilai laporan keuangan secara menyeluruh. Kesimpulannya, opini TMP menunjukkan bahwa auditor tidak dapat memberikan pendapat mereka tentang kredibilitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Putra (2021) penyerapan anggaran tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya patokan dalam pelaksanaan anggaran. Anggaran yang ditetapkan harus menerapkan prinsip *value for money*. *Value for money* merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja, yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja keuangan Pemda, sedangkan semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kinerja

yang baik. Opini BPK menurunkan tingkat efisiensi, dalam artian, sesuai dengan penghitungan rata-rata nilai efisiensi, Pemda yang mempunyai opini WTP di bawah rata-rata nilai efisiensi Pemda yang mempunyai opini WDP, TMP, dan TW. LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP, memiliki rasio efisiensi yang tinggi sehingga disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut adalah buruk.

Penerapan *value for money* diatur oleh pemerintah pusat sendiri dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang indikator pelaksanaan anggaran, yaitu: realisasi anggaran dengan bobot 15 persen, data kontrak dengan bobot 15 persen, penyelesaian tagihan dengan bobot 12 persen, konfirmasi capaian output dengan bobot 10 persen, pengelolaan UP dengan bobot 8 persen, revisi DIPA dengan bobot 5 persen, deviasi halaman III DIPA dengan bobot 5 persen, LPJ Bendahara dengan bobot 5 persen, perencanaan kas dengan bobot 5 persen, kesalahan SPM dengan bobot 5 persen, retur SP2D dengan bobot 5 persen, pagu minus dengan bobot 5 persen, dan dispensasi SPM dengan bobot 5 persen. Oleh sebab itu, penyerapan anggaran tidak bisa menjadi indikator tunggal dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah akan lebih baik jika proses penyusunan anggaran tersusun dengan baik (Hartandi, 2022). Menurut Sewang (2021), perencanaan anggaran yang dilaksanakan dengan baik akan berpengaruh dalam upaya peningkatan kinerja keuangan daerah. Perencanaan anggaran yang terarah menjadikan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pengeluaran, serta mengalokasikan sumber daya keuangan dengan tepat. Perencanaan anggaran yang matang juga membantu dalam menghindari pemborosan, meminimalkan risiko defisit anggaran, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang baik memberikan landasan yang kuat untuk mencapai kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang sudah disusun (Mardiasmo, 2002: 61).

Faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan komponen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran karena SDM selalu terkait mulai dari penetapan sasaran hingga evaluasi (Puluala, 2021). SDM yang kompeten dan mampu memahami logika penyerapan anggaran dengan baik tentunya sangat membantu dalam memaksimalkan kinerja. Kegagalan SDM pemerintah daerah berdampak pada kekeliruan penyerapan anggaran yang

ditargetkan. Oleh karena itu, SDM yang kompeten adalah faktor penting demi tercapainya realisasi anggaran OPD sesuai dengan yang ditargetkan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, terbatasnya jumlah pegawai atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan dalam mengaplikasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada masing-masing aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengelola informasi keuangan disajikan dengan kurang lengkap, cermat, dan akurat. Oleh sebab itu SDM perlu dikelola secara baik dan professional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan SDM dengan tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan.

UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugasnya serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Republik Indonesia, 2013). Kompetensi memiliki hubungan yang berkaitan dengan kinerja dari sumber daya manusia suatu organisasi (Saputra *et al.*, 2020).

Menurut Rinova & Dewi (2021), pemerintah daerah harus memperbaiki perencanaan anggaran dan kualitas SDM mereka untuk meningkatkan daya serap anggaran dan mempercepat kinerja keuangan daerah. Namun, jika dikaitkan dengan teori *goal setting*, yang menjelaskan tujuan suatu organisasi, penetapan tujuan yang jelas akan meningkatkan antusiasme anggota organisasi, terutama dalam hal perencanaan



anggaran dan kualitas sumber daya manusia pemerintahan daerah. Perencanaan anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan, yang mencegah peningkatan penyerapan anggaran. Perencanaan merupakan faktor tunggal yang paling penting di tingkat pemerintah daerah, dan dapat memperparah semua kesulitan lainnya dalam kinerja keuangan daerah.

Sistem informasi keuangan daerah juga dibutuhkan dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 mengenai penggunaan aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan kualitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan suatu program (Republik Indonesia, 2019). Sistem informasi keuangan daerah adalah sistem penggolongan, pengelompokan, pencatatan, pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak ketiga dalam proses pengambilan keputusan.

Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah, menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat, menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, serta menyajikan informasi yang akurat (Anisa *et al.*, 2019; Dyastiarini, 2015). SIPKD merupakan bentuk transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemda. Pengimplementasian SIPKD tentunya untuk meningkatkan kegunaan sistem informasi guna peningkatan

kinerja aparat pemerintah daerah dalam memenuhi harapan masyarakat tentang pemerintahan yang transparan. Menurut Hanifa *et al.* (2016) ada beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang berkualitas untuk pengambilan keputusan seperti sistem akuntansi yang tidak berjalan maksimal, sehingga berdampak pada penyusunan laporan keuangan. Kompetensi SDM dalam menggunakan SIPKD sangat menentukan keberhasilan implementasi SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Studi sebelumnya dilakukan oleh Sewang (2021) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang dilaksanakan dengan dan optimalisasi penerapan sistem informasi keuangan baik akan berpengaruh dalam upaya peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamuju. Putri & Syarief (2022), menemukan bahwa adanya pengaruh mediasi yang signifikan dari kompetensi SDM terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, melalui pengelolaan keuangan daerah. Siregar (2019), dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kualitas anggaran memengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan pengaruh antara variabel kualitas SDM, kualitas anggaran terhadap keuangan daerah tidak dimediasi oleh SIMDA pada SKPD Kabupaten Deli Serdang.

Adapun penelitian ini menggunakan sistem informasi keuangan daerah sebagai variable mediasi (*intervening*) dan melihat bagaimana perencanaan anggaran dan kualitas SDM berkorelasi dengan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, peneliti memilih judul "**Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Taliabu.**"

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel mediasi sistem informasi keuangan daerah Pulau Taliabu?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel mediasi sistem informasi keuangan daerah Pulau Taliabu?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas SDM terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Taliabu, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem informasi keuangan daerah. Adapun tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel mediasi, yaitu sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel mediasi, yaitu sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu?

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis dan praktis bagi akademisi, pegawai di lingkungan pemerintahan daerah, dan kepala pemerintah daerah dalam menilai kinerja keuangan daerah.

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan tentang perencanaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, dan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khasanah pengetahuan mengenai relevansi teori *goal setting* pada organisasi sektor publik.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Pulau Taliabu dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan daerah ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran

pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan praktis dalam memberikan rekomendasi dan masukan konkret untuk peningkatan kinerja keuangan daerah, yang dapat berdampak langsung bagi pemerintah daerah setempat.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan permasalahan yang akan dikaji dalam suatu kajian ilmiah. Hal ini mencakup pembatasan permasalahan, pempersempitan area penelitian, dan batasan subjek yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pengamatan pengaruh perencanaan keuangan dan kualitas SDM terhadap optimalisasi kinerja keuangan daerah, baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi, yaitu sistem informasi keuangan daerah. Penelitian ini tidak mencakup aspek lain yang tidak terkait dengan pengaruh perencanaan keuangan, kualitas SDM, dan sistem informasi keuangan terhadap kinerja keuangan daerah.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai fenomena yang melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah, dan tujuan yang ingin dicapai.

Bab kedua tinjauan pustaka yang berisi pembahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas. Terdapat dua bagian pada bab ini yaitu

pertama tinjauan teori dan konsep yang terdiri dari penjelasan mengenai perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan empiris yaitu menjelaskan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab ketiga membahas mengenai logika penelitian yang menggambarkan keterkaitan setiap variabel yang akan diuji dengan landasan teori yang digunakan, serta hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

Bab keempat yaitu metode penelitian yang mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian dan teknik analisis data.

Bab kelima yaitu hasil penelitian yang berisikan analisis penelitian dari data yang diolah dan diuji.

Bab keenam pembahasan yang membahas mengenai interpretasi atas hasil penelitian yang telah ditemukan.

Bab ketujuh merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1. *New Public Management (NPM)***

Munculnya konsep *New Public Management (NPM)*, yang merupakan salah satu gerakan reformasi publik, yang awalnya diperkenalkan oleh Christopher Hood pada Tahun 1991. Dari perspektif historis, pada 1980an dan 1990an di Eropa, muncul pendekatan manajemen modern di sektor publik, hal ini sebagai reaksi terhadap tidak memadainya administrasi tradisional (Mahmudi, 2015:36).

Model pemerintahan menurut Osborne & Gaebler (1992) di Era NPM (Mardiasmo, 2002a, p. 79), yaitu pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang lebih banyak digerakkan oleh tujuan yang menjadi misinya. Menurut Hood (1991) dalam (Alsharari, 2022), konsep NPM memiliki ciri utama yang lebih mendasarkan pada prinsip, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan indikator kinerja;
- b. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output; dan
- c. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi dalam pelayanan publik.

Implementasi NPM pada reformasi organisasi publik saat ini adalah perbaikan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan aspek *value for money*, yaitu: ekonomi, efisien dan efektif, sehingga mencapai kinerja organisasi secara optimal (Ariesmawati *et al.*, 2020). Tuntutan pembaharuan (reformasi) sistem keuangan pada organisasi publik memiliki tujuan agar pengelolaan uang publik dapat dilakukan secara transparan berdasarkan konsep *value for money*, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas publik.

### **2.1.2. Goal Setting Theory**

Menurut Locke *et al.* (1981) *goal* diartikan sebagai “*is what an individual is trying to accomplish*”, ini disebut sebagai objek atau tujuan dari suatu perilaku. Konsep ini hampir sama dengan konsep tujuan dan maksud. Konsep ini juga sering dimaknai dengan tujuan yang termasuk didalamnya adalah standar *performance* (ukuran untuk evaluasi hasil *performance*). Penetapan tujuan yang jelas juga akan menampakkan adanya peningkatan antusiasme, dan dengan adanya tujuan yang penting bagi seseorang akan mengantarkannya pada produksi energi yang besar dari pada tujuan yang tidak terlalu penting (Zwikael & Meredith, 2019).

Ada empat mekanisme dasar bahwa tujuan dapat mengantarkan seseorang mencapai *performance* yang telah ditetapkan secara maksimal (Locke & Latham, 2002). 1) Tujuan dapat mengarahkan perhatian dan tindakan seseorang kepada tugas yang relevan untuk pencapaian prestasi. 2) Tujuan berfungsi untuk memberikan *energy* yang



menggerakkan atau memobilisasi pada usaha yang tinggi untuk mencapai performansi. 3) Tujuan berpengaruh terhadap ketekunan seseorang. 4) Tujuan mempengaruhi tindakan untuk pencarian, dan penggunaan pengetahuan dan strategi yang relevan terhadap tugas.

Mengacu pada *Locke's model* (Arsanti, 2009), *goal setting theory* atau teori penetapan tujuan mempunyai empat mekanisme dalam memotivasi individu untuk mencapai kinerja. Pertama, penetapan tujuan dapat mengarahkan perhatian individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Kedua, tujuan dapat membantu mengatur usaha yang diberikan oleh individu untuk mencapai tujuan. Ketiga, adanya tujuan dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapai tujuan tersebut. Keempat, tujuan membantu individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan sesuai yang direncanakan. Dengan demikian, dengan adanya penetapan tujuan dapat meningkatkan kinerja individu yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Komitmen harus ada dalam *goal setting*. Komitmen terhadap *goal* nampak secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada *performance*. Bila *person's goal* tinggi, maka *high commitment* akan membawa pada *higher performance* dibandingkan ketika *low commitment*. Tetapi, bila *goals* rendah, *high commitment* membatasi *performance*.

### **2.1.3. Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Kuntadi *et al.* (2022) kinerja keuangan daerah merupakan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menggali, mengelola dan

memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli milik daerah itu sendiri, dengan begitu dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan di suatu daerah dan dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat akan adanya kebebasan penuh dalam menggunakan/ memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam penelitian Karsana dan Suaryana (2017), pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan disajikan dalam Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 jenis laporan yaitu

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Mardiasmo (2016) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan yaitu untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan

pertanggungjawaban publik, dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sedangkan Sino *et al.* (2013) menjelaskan hasil analisis keuangan daerah digunakan sebagai total ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

#### **1. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim, 2007):

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

## **2. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi (Mahsun, 2017 dalam Nurhaedah, 2022):

### **a. Indikator Masukan (*Inputs*)**

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

### **b. Indikator Proses (*Process*)**

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya, ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

Esensi utama anggaran ini adalah memasukan elemen indikator kinerja dalam proses penyusunan APBD di daerah. Maka seluruh program/ kegiatan yang didanai APBD mesti memiliki tujuan/sasaran yang terukur mulai dari input, output, keuntungan, dampak dan manfaatnya.

#### **2.1.4. Perencanaan Anggaran**

Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Robbins & Coulter, 2002 dalam Zarinah *et al.*, 2016).

Perencanaan dapat dilihat dalam tiga kategori, yaitu:

1) Kategori Proses

Perencanaan merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cara atau strategi dalam pencapaian tujuan tersebut.

2) Kategori Fungsi Manajemen

Perencanaan berfungsi pada kondisi dimana pimpinan menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi.

3) Kategori Pengambilan Keputusan

Perencanaan adalah pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai hal yang akan dilakukan, cara pelaksanaan, dan waktu serta pelaku hal tersebut. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya sehingga implementasi perencanaan tersebut akan dibuktikan pada masa yang akan datang. Pokok dari perencanaan adalah salah satu langkah antisipasi atas kejadian di masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Perencanaan anggaran adalah salah satu bagian dari perencanaan organisasi, baik untuk organisasi publik maupun organisasi privat.

Terdapat empat indikator perencanaan anggaran menurut Conyers & Hills dalam Susan (2019), yaitu:

- 1) Merencanakan berarti menentukan pilihan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tahap perencanaan adalah proses pemilihan berbagai sumber daya yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan.
- 2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Pada tahap perencanaan dilaksanakan suatu proses alokasi besarnya sumber daya yang digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu pilihan berarti menentukan prioritas pembangunan daerah, baik fokus (sektoral) maupun lokusnya (wilayah). Lokus memperlihatkan wilayah (kabupaten/kota/kecamatan/kawasan) yang ingin dikerjakan, sedangkan fokus memperhatikan sektor yang menjadi prioritas.
- 3) Perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai.
- 4) Perencanaan untuk masa depan. Diartikan bahwa perencanaan merupakan tahap yang diperlukan dalam menentukan masa depan.

UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBD/APBN dalam undang-undang tersebut meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem Perencanaan anggaran kinerja dalam sistem penganggaran,

penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD merupakan tahapan awal dalam perumusan APBD. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Setelah RKPD ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam



menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD (KUA).

- 3) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan; 1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 2) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Selanjutnya menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dijabarkan sampai dengan penjabaran objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

- 5) Penyiapan Raperda APBD. Selanjutnya, berdasarkan pada RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- 6) Penetapan APBD Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Terdapat beberapa fungsi yang mengaitkan anggaran dengan manajer (pemimpin) dan para staf yang terkait di dalamnya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah (Mardiasmo, 2002):

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui perencanaan, seorang manajer atau pimpinan mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan dan mengidentifikasi tindakan untuk mencapainya. Dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (Puspaningsih, 2002)

2. Anggaran sebagai alat pengendalian.

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Proses pengendalian dapat diidentifikasi menjadi 3 tipe yakni *preliminary control*, *concurrent control*, dan *feedback control* (Welsch dalam Puspaningsih, 2002). Dalam kaitannya dengan anggaran, anggaran dapat dijadikan alat pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Pada tahap *preliminary control* anggaran dapat

dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sumber daya dan orang-orang yang dilibatkan agar siap untuk memulai kegiatan.

Pada tahap *concurrent control* pengendalian dilakukan dengan cara observasi terhadap orang-orang yang terkait dan laporan untuk menjamin bahwa sasaran sudah tepat dan kebijakan serta prosedur telah dilaksanakan dengan baik selama kegiatan berlangsung. Dalam kaitannya dengan anggaran, pada tahap ini dilakukan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya. Juga disiapkan laporan tentang realisasi, anggaran dan selisih anggaran. Dari selisih yang ada kemudian dicari penyebab terjadinya selisih tersebut. Berikutnya dikembangkan beberapa alternatif tindakan koreksinya serta dipilih alternative yang terbaik. Selanjutnya hasil dari tahap ini digunakan pada tahap *feedback control* untuk menyusun pengendalian kegiatan yang akan datang (Puspaningsih, 2002).

### 3. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Setiap unit kerja pemerintahan memiliki kaitan dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

### 4. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.

Dalam hal ini, kinerja *budget holder* akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja (Mardiasmo, 2002).

5. Anggaran sebagai Alat Motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai (Mardiasmo, 2002).

Agar dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut, seluruh pemimpin dan para stafnya terutama yang terkait dalam penyusunan anggaran harus memiliki kualifikasi yang memadai dan memiliki pengetahuan, keterampilan serta pola pikir yang mendukung penerapan anggaran yang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung dan dilaksanakan. Salah

satu langkahnya adalah negosiasi pihak-pihak yang terkait mengenai angka anggaran.

Anggaran untuk selanjutnya diimplementasikan dan berfungsi sebagai blueprint berbagai tindakan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dalam tahap implementasi ini, manajer bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan tersebut kepada manajer tingkat menengah dan bawah. Hal ini dimaksudkan agar manajer menengah dan bawah tahu dan bersedia dengan penuh kesadaran untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan dalam anggaran. Dalam tahap implementasi ini, juga diperlukan kerjasama dan koordinasi agar anggaran dapat diimplementasikan dengan baik (Puspaningsih, 2002).

Menurut Zarinah et al., (2016) bahwa semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target Kinerja Keuangan Daerah dapat tercapai. Sebaliknya, apabila perencanaan anggaran belum dilakukan dengan baik serta belum sesuai dengan prinsip perencanaan anggaran akan mengakibatkan keterlambatan pengesahan anggaran. Keterlambatan-keterlambatan tersebut akan berdampak pada tidak berjalannya program kerja pemerintah yang secara tidak langsung tentunya akan memberi dampak buruk terhadap kinerja pemerintah seperti tingkat Kinerja Keuangan Daerah yang belum maksimal. Hasil penelitian Siregar (2019) menemukan pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten

Deli Serdang. Sejalan dengan penelitian Sewang (2021), Maidar *et al.* (2021) dan Fauzan *et al.* (2019). Berbeda dengan Imelia *et al.* (2021) yang memaparkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

SIPKD dalam *goal setting theory* menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja atau kinerja. Menurut Locke & Latham (1991) *goal setting theory* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan kerja.

Locke dalam Kusuma (2013) mengungkapkan bahwa setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (*goal*) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Begitupun dalam pemerintahan, dengan adanya perencanaan anggaran yang matang didukung dengan sistem informasi keuangan daerah maka di harapkan dapat mencapai sasaran yaitu kinerja keuangan daerah yang baik.

#### **2.1.5. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. APBD dalam era otonomi Daerah disusun dengan

pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output anggaran.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya terdapat 2 hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran (anggaran policy) dan anggaran kinerja (performance budget). Kinerja anggaran adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah. Alat tersebut berupa strategi makro dan Policy yang tertuang dalam Propeda dan Renstrada, arah dan kebijakan umum APBD, serta strategi dan prioritas APBD. Anggaran keuangan adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali Kepala Daerah selaku kepala eksekutif.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

Anggaran kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari



perencanaan biaya atau input yang ditetapkan. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja (SAB), tolok ukur kinerja, dan standar biaya. SAB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. SAB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program anggaran atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan (Arif, 2014).

SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kerja) yang diinginkan. SAB dihitung oleh masing-masing SKPD berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program dan atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan SAB akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan SKPD. Penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain

1. Mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya;

2. Menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja; dan
3. Mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan mendukung kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan oleh daerah dan sekaligus merupakan perencanaan anggaran daerah. Penetapan standar pelayanan untuk daerah kabupaten mengacu pada indikator- indikator pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berpedoman pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati. Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya.

#### **2.1.5. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting pada suatu organisasi karena adanya potensi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Listiyani dan Gunawan, 2020). Sedangkan menurut Siregar (2019) sumber daya manusia memainkan peran penting baik dalam skala mikro (organisasi) maupun dalam skala makro (negara). Pada setiap organisasi, besar atau kecil, bertaraf internasional, regional ataupun domestik, kunci keberhasilan utama bagi organisasi tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang mengendalikan dan menjalankannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan,

pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Tanpa adanya unsur manusia dalam perusahaan, tidak mungkin perusahaan tersebut dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan.

SDM berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif generatif inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*. Tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya (Silalahi dan Mifka, 2015).

Dalam mengelola SDM, diperlukan sistem pengendalian manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (individual goal). Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organization goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal (Mardiasmo, 2002).

Kunci menuju keunggulan kompetitif suatu organisasi, pada dasarnya bersandar pada penggunaan optimal sumber daya manusianya dan pemeliharaan kerjasama antara pengguna jasa dan orang yang diperkerjakan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan organisasi (Singh dalam Hutapea & Nurianna Thoha, 2008). Tidak mudah menjadikan SDM sebagai sumber keunggulan kompetitif organisasi karena hal itu berkaitan dengan bukan saja faktor kemampuan dan keahlian melainkan berkaitan pula dengan faktor-faktor personal lainnya seperti, nilai yang dianut, persepsi, sikap, personality, dan kemauan individu untuk maju. SDM dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika memiliki kemampuan dan keahlian yang khas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan organizational personality di mana mereka bekerja (Alwi, 2001).

SDM memiliki fungsi penting dalam penentuan indikator kinerja yang merupakan bagian dari penetapan sasaran anggaran dimana mekanismenya memerlukan hal-hal berikut seperti diungkapkan oleh (Alwi, 2001):

1. Sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.

2. Spesifikasi teknis dan standardisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi yang telah ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan).
5. Mekanisme Sumber Daya Manusia. Pemerintah dalam hal ini pemimpin perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

Salah satu manfaat utama penggunaan kompetensi dalam organisasi adalah menggerakkan SDM ke arah target yang ingin dicapai organisasi. Di samping itu, kompetensi akan mendorong karyawan untuk mendapatkan dan menerapkan skill dan knowledge sesuai kebutuhan pekerjaan, karena hal ini merupakan instrument bagi pencapaian

targetnya. Untuk itu sistem pengembangan SDM di organisasi haruslah berdasarkan kompetensi. Sistemnya harus terintegrasi mulai dari rekrutmen, penempatan orang, performance appraisal, sistem kompensasi dan pengembangan karir.

Adapun Indikator Kualitas SDM menurut (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008) yaitu :

1. Memahami bidangnya masing-masing;
2. Pengetahuan;
3. Kemampuan;
4. Semangat kerja; dan
5. Kemampuan perencanaan/pengorganisasian.

Werther & Davis dalam Siregar (2019), menyatakan bahwa SDM adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Kasmir (2016), menegaskan bahwa organisasi pemerintah yang memiliki SDM di bawah kapasitas atau belum memadai sangat berefek pada kinerja pemerintah itu sendiri, seperti tidak tercapainya target pendapatan dan Kinerja Keuangan Daerah yang direncanakan. Hasil penelitian Putri dan Syarief (2022), menemukan adanya pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Yuliandari *et al.* (2007) yang

menunjukkan kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian oleh Maidar, dkk (2021) dan Sumaryanti, dkk (2020) Namun pada pengujian yang dilakukan Imelia, dkk (2021) kompetensi SDM tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

*Goal setting theory* menyatakan bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah. Artinya jika seorang pegawai pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.

Dengan pendekatan *goal setting theory*, kinerja keuangan daerah diasumsikan sebagai salah satu tujuan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan daerah menjadi faktor penentunya. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, pegawai pemerintah yang berperan sebagai sumber daya manusia akan menunjukkan kualitas terbaiknya dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan daerahnya demi memperoleh kinerja yang lebih baik.

### **2.1.6. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)**

SIPKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. SIPD adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan suatu kemajuan akan kinerja instansi di pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Perundang-undangan yang berlaku serta disajikan secara andal dan tepat waktu.

Aplikasi SIKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD. Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut (Yusuf,2016):



1. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah melalui penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat.

Menurut Yusuf (2016) penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dapat diukur menggunakan indikator berikut:

1. Keamanan data;
2. Kecepatan dan ketepatan waktu;
3. Ketelitian;
4. Variasi laporan atau output; dan
5. Relevansi sistem.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Putri dan Syarief (2022), menemukan bahwa adanya pengaruh mediasi yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, melalui pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Siregar (2019), dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kualitas anggaran memengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan pengaruh

antara variabel kualitas sumber daya manusia, kualitas anggaran terhadap keuangan daerah tidak dimediasi oleh SIMDA pada SKPD Kabupaten Deli Serdang.

- 3) Sewang (2021), menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang dilaksanakan dengan baik akan berpengaruh dalam upaya peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamuju. Kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamuju. Serta optimalisasi penerapan sistem informasi keuangan di lingkup pemerintahan Kabupaten Pulau Mamuju terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.
- 4) Purnamasari (2019), menemukan bahwa semakin tinggi komitmen dan semakin baik disiplin kerja yang dimiliki oleh pegawai, maka akan berdampak terhadap peningkatan kinerja yang artinya kinerja pun akan semakin baik. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan pada SKPD di Kota Makassar. Ini juga mengindikasikan bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja.
- 5) Imelia *et al.* (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa secara bersama-sama kompetensi Sumber Daya Manusia, partisipasi penyusunan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, pada pengujian hipotesis

masing-masing variabel memiliki hasil yang berbeda-beda. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan tingkat partisipasi penyusunan anggaran tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

- 6) Sumaryati, *et al.* (2020) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, namun penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini menggaris bawahi pentingnya kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 7) Maidar, *et al.* (2021) menemukan bahwa perencanaan anggaran dan sumber daya manusia secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
- 8) Mau, *et al.* (2023) memperlihatkan bila penggunaan teknologi informasi secara parsial tidak memengaruhi secara signifikan bagi kualitas laporan keuangan. Perihal ini dikarenakan masih belum terintegrasi aplikasi yang digunakan, dan masih kurangnya sarana dan prasarana komputer pada masing-masing SKPD. Variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah memengaruhi secara signifikan bagi laporan keuangan.

Pengujian yang terlaksana secara simultan Pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia maupun pengawasan keuangan daerah memengaruhi signifikan bagi kualitas laporan keuangan.

- 9) Fauzan, *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kualitas penganggaran, kompetensi keuangan Sumber Daya Manusia di sekolah dan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sekolah secara bersama. Teknologi informasi berpengaruh positif dalam memoderasi pengaruh kualitas anggaran terhadap kinerja keuangan sekolah. Namun, teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh anggaran kualitas kinerja keuangan sekolah.

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **3.1. Kerangka Konseptual**

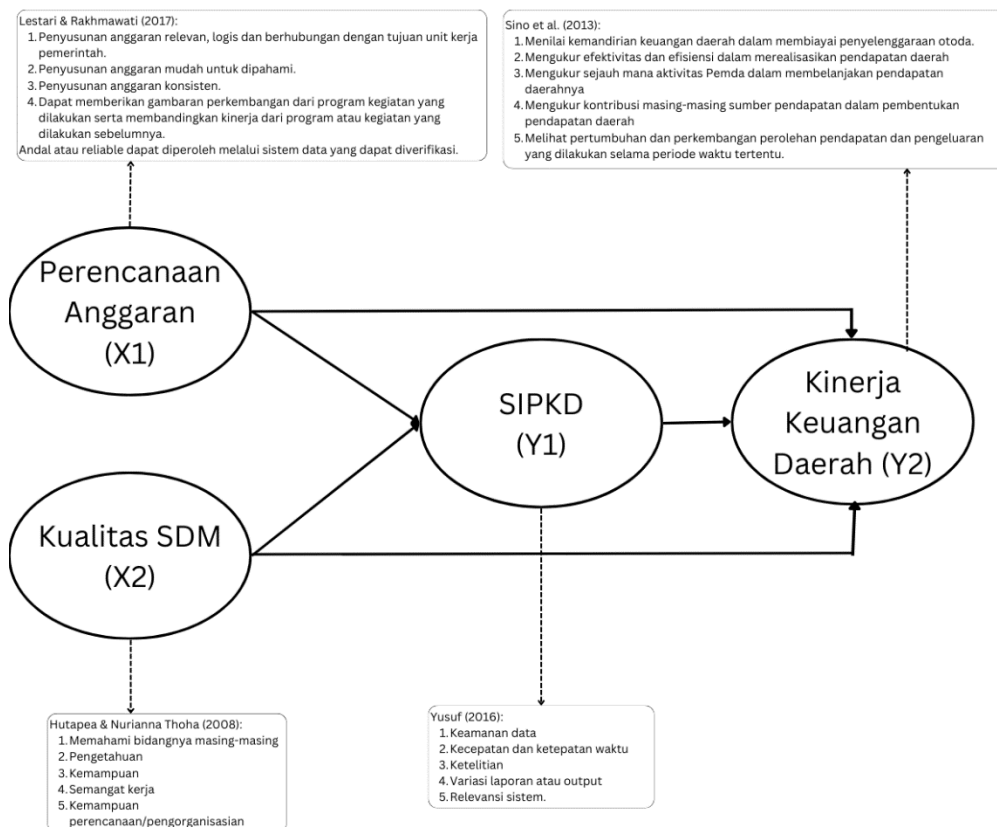
Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Amin, 2015). Pentingnya kinerja keuangan daerah, sehingga perlu diketahui hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perencanaan anggaran dan kualitas SDM terhadap kinerja keuangan daerah melalui SIPKD.

Perencanaan anggaran merupakan variabel independen karena salah satu faktor cerminan dari efektifitas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Variabel independen lainnya yaitu kualitas SDM karena merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi, terlebih dalam lingkup pemerintahan karena untuk memperoleh kinerja yang baik maka perlu sumber daya manusia yang berkualitas.

Variabel SIPKD menjadi variabel intervening dalam penelitian ini, namun juga memiliki hubungan langsung ke variabel kinerja keuangan daerah. SIPKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,

mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Berdasarkan keterkaitan konsep serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini menjelaskan mengenai kontribusi perencanaan anggaran dan kualitas SDM terhadap kinerja keuangan daerah melalui SIPKD. Oleh sebab itu, untuk membantu memahami penelitian ini, diperlukan adanya kerangka konseptual sebagai berikut.



**Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual**

## 3.2. Hipotesis

### 3.2.1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan pemerintah memiliki tujuan yakni mewujudkan *good government governance* dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara. Reformasi pengelolaan keuangan berawal dari perencanaan pengelolaan anggaran, yaitu menyusun RKA dari setiap satuan-satuan kerja. Penyusunan RKA yang memadai dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan. Anggaran yang berorientasi kinerja (*performance budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada pengukuran output (*output measurement*) organisasi, dengan alokasi sumber daya ke program bukan pada unit organisasi, yang berhubungan dengan visi, misi, serta rencana strategi organisasi, dengan mempertimbangkan biaya unit (*unit cost*) dan beban kerja (*work load*) dari setiap kegiatan. Tujuan dari penetapan pengukuran kinerja output yang dikaitkan dengan biaya adalah mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, karena merupakan output dari suatu proses kegiatan organisasi (Bastian, 2010:202).

Implementasi NPM pada reformasi organisasi publik saat ini adalah perbaikan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif, dengan

memperhatikan aspek *value for money*, yaitu: ekonomi, efisien dan efektif, sehingga mencapai kinerja organisasi secara optimal (Halim & Kusufi, 2014:5). Hal ini mendominasi pemikiran para praktisi, pemimpin pemerintahan dan akademisi, berdasarkan asumsi bahwa reformasi NPM merupakan respon umum terhadap tekanan yang meluas untuk meningkatkan manajemen dan layanan publik, mengatasi tekanan fiskal dan mewujudkan pentingnya globalisasi (Alsharari, 2022). Tuntutan pembaharuan (reformasi) sistem keuangan pada organisasi publik memiliki tujuan agar pengelolaan uang publik dapat dilakukan secara transparan berdasarkan konsep *value for money*, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas publik.

*Goal Setting Theory* adalah teori yang mengajukan bahwa penetapan tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang dapat memotivasi individu untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Teori ini berpendapat bahwa ketika individu memiliki tujuan yang jelas dan terukur, mereka akan lebih fokus, bersemangat dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan anggaran, di sisi lain, adalah proses menetapkan dan mengalokasikan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan penentuan tujuan keuangan, identifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran, serta alokasi dana pada berbagai kegiatan dan fungsi organisasi. Ketika perencanaan anggaran dilakukan dengan penetapan tujuan yang jelas dan terukur maka dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu dalam mencapai tujuan keuangan.



Siregar (2019) dan Sewang (2021) menemukan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan dengan baik memengaruhi kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Mamuju. Puluala (2021) menemukan bahwa jika perencanaan dilaksanakan sesuai dengan sasaran, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensinya terhadap sasaran. Dengan kata lain, semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dan kinerja keuangan dapat tercapai.

Salah satu bentuk pengendalian yang dapat digunakan untuk mencapai kinerja adalah melalui sistem informasi keuangan daerah, hal ini karena SIKD merupakan kontrol sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah daerah. Sistem informasi dibutuhkan dalam proses penyusunan dan pelaporan laporan keuangan. Sewang (2021) menemukan bahwa optimalisasi penerapan sistem informasi keuangan di lingkup pemerintahan Kabupaten Pulau Mamuju terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem informasi keuangan daerah

### **3.2.2. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi SDM sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. SDM adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan kinerja keuangan yang baik. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh SDM yang dimilikinya melainkan kompetensi SDM yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi SDM memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi, dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di

lingkungan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu memahami akuntansi dan sistem informasi keuangan daerah tersebut.

*Goal Setting Theory* menekankan pentingnya penetapan tujuan yang jelas dan terukur. Pada konteks penyusunan laporan keuangan, tujuan yang jelas dapat berarti menetapkan standar yang spesifik untuk kualitas, keakuratan, dan waktu penyelesaian laporan keuangan. SIPKD dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan kinerja keuangan yang baik dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Dengan memiliki tujuan yang jelas, SDM dapat mengarahkan upaya mereka dan berfokus pada upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, SDM yang berkompeten sangat dibutuhkan agar mampu mengoperasikan SIPKD dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnamasari (2019) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan pada SKPD di Kota Makassar. Ini juga mengindikasikan bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Imelia *et al.* (2021) menemukan pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta kompetensi SDM dan tingkat partisipasi penyusunan anggaran tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil yang berbeda dari Imelia *et al.* (2021) ditunjukkan oleh Sumaryati, *et al.* (2020) yang menyimpulkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, namun penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Implikasi dari penelitian ini menggaris bawahi pentingnya kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut

H2: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem informasi keuangan daerah